PENEGAKAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PIDANA NOTARIS DALAM KEWENANGAN SEBAGAI PPAT DI POLDA SULAWESI SELATAN

Nurfadillah Ridwan¹, I Gede Yusa²

Fakultas Hukum Universitas Udayana^{1,2}

Email: nurfadillahridwan95@gmail.com¹, gd_yusa@unud.ac.id²

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diatur hanya sanksi Akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum dan sanksi administrasi. Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan sanksi pidana notaris yang melakukan suatu pelanggaran hukum dalam UUN dalam penelitian tersebut yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum Tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan? 2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*), Jenis pendekatan yaitu 1. Pendekatan Perundang-undangan, 2. Pendekatan Konseptual dan 3. Pendekatan Kasus. Lokasi penelitian adalah di Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. Sumber Data Hukum yaitu Sumber Data Hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Data Hukum yaitu Studi Dokumentasi dan Wawancara. Serta Teknik Analisis Data Hukum adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penegakan hukum Tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan adalah belum dilaksanakan secara efektif karena belum adanya pengaturan hukum yang mengatur secara rinci dalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait sanksi pidana bagi notaris yang melakukan suatu pelanggaran hukum. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut yaitu: a. Faktor Struktur Hukum, b. Faktor Substansi Hukum dan c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tanggung Jawab, pidana, Notaris.

Abstract

Based on the Notary Law, only sanctions are regulated for a deed to be degraded to a deed under hand, null and void by law and administrative sanctions. Based on these problems, there is legal uncertainty regarding the regulation of criminal sanctions for notaries who commit a violation of the law in the UUN in the study, namely: 1. How is the implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi

Regional Police? 2. What are the factors that influence the implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police? This research is an empirical legal research, the types of approaches are 1. Legislation Approach, 2. Conceptual Approach and 3. Case Approach. The location of the research is at the South Sulawesi Regional Police Office (POLDA). Legal Data Sources are primary, secondary and tertiary Legal Data Sources. Legal Data Collection Techniques are Documentation Study and Interviews. And the Legal Data Analysis Technique is Qualitative Descriptive. The results of the study indicate the following: 1. The implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police has not been implemented effectively because there are no legal regulations that regulate in detail in the Notary Law regarding criminal sanctions for notaries who commit a violation of the law. 2. The factors that influence the implementation of the law enforcement of the criminal responsibility of notaries in their authority as PPAT at the South Sulawesi Regional Police are as follows: a. Legal Structure Factor, b. Legal Substance Factor and c. Facilities and Infrastructure Factor.

Keywords: Law Enforcement, Responsibility, Criminal, Notary.

A. Pendahuluan

Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris.¹

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.² Berbeda dengan perkara Pidana, akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.³

Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik Notaris.

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 46.

² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 24.

³ M, Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 283.

Tabel 1
Ketentuan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Sumber : Undang-Undang Jabatan Notaris

Menurut hemat penulis, bahwa setelah membaca dan menganalisis secara

Pasal	Penjelasan
Pasal 84	Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Pasal 85	Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.

hukum Undang-Undang Jabatan Notaris, penulis menemukan bahwa sanksi yang diatur dalam UUJN yaitu hanya sanksi Akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, batal demi hukum dan sanksi administrasi. Akan tetapi walaupun tidak diatur dalam UUJN apabila Notaris melakukan pelanggaran tindak pidana maka akan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku umum, sebagaimana dikuatkan dalam Pasal 2 mengatur bahwa:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 2 KUHPidana di atas dikuatkan pula dalam Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana mengatur bahwa:⁴

“Apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang

⁴Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 208.

husus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUH Pidana.”

Bahkan menurut Aparat Penegak Hukum apabila Notaris melakukan pelanggaran pidana pada saat melaksanakan jabatannya, maka akan diberikan pemberatan karena Jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya mengatur bahwa:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.”

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan Pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Tabel 2
Pasal Terkait Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Notaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal	Penjelasan
263 KUHP	<p>(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>
264 KUHP	<p>(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

	<p>5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>
266 KUHP	<p>(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>

Sumber : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Salah satu contoh tindak pidana pemalsuan akta autentik berdasarkan Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Nomor BP/46/IX/2021/DITRESKRIMUM) terjadi pada tahun 2016 di Kab. Gowa atau di wilayah hukum Polda Sulesel, adapun uraian kejadian secara singkat.

Tersangka Jamaluddin Ais DG Barang mengurus dan menyuruh membuat Akta Jual Beli Nomor: 69/TM/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 antara tersangka dengan pelapor Sittiarah DG Sakking untuk hak sebidang tanah yang terletak di Dusun Garassi Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa (Harta Peninggalan orang tua pelapor yang bernama Al. Ismail DG Mone) dengan dasar hak berupa SHM No. 971/Kelurahan malino luas 16.579 M2, dan menyampaikan kepada pihak PPAT Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa dan Lurah Garassi tersangka telah membeli tanah milik pelapor Sittiarah DG Sakking yang sebenarnya Sittiarah DG Sakking tidak pernah menjual keseluruhannya lokasinya kepada Jamaluddin Ais DG Barang melainkan Siti DG Sakking menjual sebagian lokasi miliknya terletak di dusun Garassi Kec. Tinggimoncong Kab Gowa dengan luas 8.960 M2 kepada Mansyah Mammisi, dan Sittiarah DG Sakking tidak pernah bertanda tangan pada Akte Jual Beli tersebut sehingga dengan adanya kejadian tersebut pelapor melaporkan ke pihak kepolisian. Terhadap tersangka Jamalluddin Ais DG Barang telah cukup bukti melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan menggunakan surat/dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.⁵

Menurut hemat penulis berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, aturan tersebut menjadi dasar hukum Aparat Penegak Hukum untuk Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, begitu pula

⁵ Muh. Ikhsan Kurniawan, 2022, *Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Akta Jual Beli) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar, h. 5.

juga kaitannya Majelis Kehormatan Notaris menjadi dasar menerima permintaan persetujuan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*). Dengan menggunakan Jenis pendekatan yaitu 1. Pendekatan Perundang-undangan, 2. Pendekatan Konseptual dan 3. Pendekatan Kasus. Lokasi penelitian adalah di Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan. Sumber Data Hukum yaitu Sumber Data Hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan Data Hukum yaitu Studi Dokumentasi dan Wawancara. Serta Teknik Analisis Data Hukum adalah Kualitatif Deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan penegakan hukum Tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan

Secara hukum Notaris/PPAT tidak memiliki hak imunitas artinya apabila Notaris melaksanakan kewenangan terdapat *mens rea* dan *Actus Reus* dan terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan maka Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana, baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus.

Ketiadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak berarti bahwa Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak adanya sanksi pidana dalam UUJN berakibat berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (peraturan berlaku umum) dalam hal terjadi tindak pidana dalam menjalankan jabatan sebagai profesi Notaris. Dalam hal ini, Notaris tersebut akan dipidana berdasarkan tindak pidana (delik) yang dilakukan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberatan tersebut diberikan karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam kedudukan sebagai pejabat umum (*ambtenaar*).

Tabel 3
Data Jumlah Kasus yang berkaitan dengan Notaris 5 Tahun Terakhir (2019 s/d 2022) Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Sulawesi Selatan

No	Tahun	Kasus	Jumlah	Selesai			Jumlah
				Hentik/ Lidik	SP3	P21	
1	2018	TP Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu 263, 264, 266	25	12	4	5	21
		TP Penggelapan Hak Pasal 385	-	-	-	-	-

		TP Penipuan dan Penggelapan Pasal 378, 372	-	-	-	-	-
Jumlah			25	12	4	5	21
2	2019	TP Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu 263, 264, 266	12	6	-	4	10
		TP Penggelapan Hak Pasal 385	-	-	-	-	-
		TP Penipuan dan Penggelapan Pasal 378, 372	-	-	-	-	-
Jumlah			12	6	-	4	10
3	2020	TP Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu 263, 264, 266.	10	6	-	2	8
		TP Penggelapan Hak Pasal 385	-	-	-	-	-
		TP Penipuan dan Penggelapan Pasal 378, 372	-	-	-	-	-
Jumlah			10	6	-	2	8
4	2021	TP Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu 263, 264, 266.	8	6	-	1	7
		TP Penggelapan Hak Pasal 385	-	-	-	-	-
		TP Penipuan dan Penggelapan Pasal 378, 372	-	-	-	-	-
Jumlah			8	6	-	1	7
5	2022	TP Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu 263, 264, 266	13	5	-	1	6
		TP Penggelapan Hak Pasal 385	-	-	-	-	-
		TP Penggelapan Hak Pasal 385	-	-	-	-	-
Jumlah			13	5	-	1	6
Jumlah 5 Tahun Terakhir (2019 s/d 2022)			68	29	-	13	42

Sumber data: Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan.

Data Jumlah Kasus yang berkaitan dengan Notaris 5 Tahun Terakhir (2019 s/d 2022) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. Berdasarkan data tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Sulsel pernah menangani Kasus pertanggungjawaban Pidana Notaris, baik sebagai saksi maupun di tetapkan sebagai tersangka.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, akan tetapi dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana apabila melakukan pelanggaran adanya *mens rea* dan terpenuhi adanya unsur tindak pidana kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ditemukan fakta hukum bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) berpendapat walaupun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana, tetapi sanksi pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana yang berlaku umum, sehingga apabila terbukti dan menyakinkan adanya unsur pidana dalam perbuatan pelanggaran Notaris maka tentu aparat penegak hukum akan memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga walaupun dalam UUJN (peraturan berlaku khusus) tidak diatur akan tetapi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian Aparat Penegak Hukum (APH) berpendapat walaupun dalam UUJN hanya menjamin kebenaran formil akan tetapi untuk menjadi *problem solving* (pemecahan masalah) terhadap ditemukannya fakta hukum adanya pertanggungjawaban pidana di profesi Notaris/PPAT sehingga sebaiknya menjadi perhatian khusus untuk menjadikan kebenaran materil menjadi prinsip kehati-hatian dengan *check and recheck*, sehingga permasalahan terhadap pertanggungjawaban hukum Profesi Notaris/PPAT bisa diselesaikan.⁷

Dalam implementasi sistem tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum mengemukakan bahwa, Aparat penegak hukum akan melakukan proses hukum secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing, apabila ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan terkait adanya praduga terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, Klien maupun pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan akta autentik tersebut, Maka tentu akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mulai proses hukum di Kepolisian, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan sehingga pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan terpenuhi unsur tindak pidananya atau tidak. Tentunya walaupun Pengadilan Negeri sudah memberikan putusan tentu ada upaya hukum ditingkat Pengadilan Tinggi (Bandung), Pengadilan Mahkamah Agung (Kasasi) dan Peninjauan Kembali (PK), sehingga apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan maka putusan pengadilan yang terakhir putusan Putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dan dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, tetapi

⁶ Suryadi, Hasil wawancara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

⁷Suryadi, Hasil wawancara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUH Pidana, sebagaimana tercantum pada Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana :⁸

“Apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUH Pidana.”

Di lain pihak, dalam pembuatan akta *partij*, Notaris secara teoritis tidak dapat dituntut atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya karena materi dalam akta tersebut didasarkan pada keterangan para pihak yang hadir di hadapan Notaris sehingga beban pembuktian terletak pada para yang menghadap Notaris. Dengan demikian, dalam pembuatan akta *partij*, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materiil. Menurut Heriyanti mengemukakan bahwa:⁹

“Pada karakter yuridis Notaris dan Akta Notaris dalam tiga yurisprudensi sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3199K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1140K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998”.

Dalam praktik pembuatan akta notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta notaris. Nilai pembuktian tersebut dapat dikaji dari beberapa putusan perkara pidana dan perkara perdata yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris. Hal itu tidak dapat dibenarkan, karena pejabat notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.¹⁰

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan

a. Faktor Struktur Hukum

⁸Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 208.

⁹Heriyanti, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris: Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*, Yuma Pustaka, Jakarta, h. 242.

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Tim Nusantara, cet. I, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), Pasal 1457.

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:¹¹

”Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan”.

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum adalah komponen yang sangat penting, mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.¹²

Menurut Soerjono Soekanto faktor pertama dapat diukur dari:¹³

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai peraturan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.¹⁴

¹¹Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 25.

¹²Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

¹³Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h. 80.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 110.

Menurut Achmad Ali mengemukakan mengenai faktor hukum bahwa:¹⁵

“Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya yang bersifat *compliance* (pemenuhan), *identification* (identifikasi), *internalization* (internalisasi)”.

Menurut Hans Kelsen, berbicara tentang efektivitas hukum, maka akan dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

Menurut Yulies Tina Masriani bahwa, yang dimaksud dengan hukum adalah:¹⁷

“Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman Masyarakat”.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penting sarana dan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerapan hukum:¹⁸

“Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya”.

Khusus untuk sarana dan fasilitas sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:¹⁹

- 1) yang tidak ada: diadakan yang baru betul;
- 2) yang rusak atau salah: diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) yang kurang: ditambah;

¹⁵Achmad Ali, 2009, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenada media Group, Jakarta, h 375.

¹⁶H. S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, cetakan Kesatu*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h. 372.

¹⁷Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13.

¹⁸Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 37.

¹⁹*Ibid.*, h. 44.

- 4) yang macet: dilancarkan;
- 5) yang mundur atau merosot;
- 6) dimajukan atau ditingkatkan.

Faktor ketiga berhubungan dengan adanya sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana untuk melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan suatu fasilitas yang digunakan sebagai alas untuk mencapai efektivitas hukum. Soerjono Soekanto telah memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, di mana prasarana itu dapat memberikan kejelasan dan kepastian bahwa merupakan sesuatu yang dapat menunjang kelancaran aparat-aparat dalam melaksanakan tugasnya. Adapun faktor yang ketiga adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
- b. Prasarana yang telah ada perlu diadakan dengan memperhitungkan waktu pengadaannya;
- c. Prasarana yang kurang perlu dilengkapi;
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
- e. Prasarana yang macet perlu dilancarkan fungsinya;
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Menurut hemat penulis berdasarkan teori soerjono soekanto di atas penulis memberikan analisis hukum bahwa sarana dan fasilitas ini kaitanya dengan Notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sehingga dengan kewenangan tersebut dibutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai untuk kelancaran pembuatan akta autentik, misalnya staff yang berpendidikan dan terampil, organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang baik, peralatan di Kantor yang memadai, dan keuangan yang cukup dan seterusnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas mempengaruhi implementasi tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT, karena tanpa adanya sarana dan fasilitas akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang seharusnya dengan yang aktual, karena Misalnya apabila staff tidak berpendidikan dan terampil dalam pembuatan akta autentik maka akan mempengaruhi kualitas akta yang dibuatnya, sehingga peranan Notaris untuk memberikan pemahaman Pendidikan dalam pembuatan akta autentik yang sesuai UUJN, begitu pula dengan peranan organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang baik seharusnya aktif untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Profesi, peralatan di Kantor yang memadai, dan keuangan yang cukup.

D. Penutup

Pelaksanaan penegakan hukum Tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan adalah belum dilaksanakan secara efektif karena belum adanya pengaturan hukum yang

²⁰Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, h. 82.

mengatur secara rinci dalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait sanksi pidana bagi notaris yang melakukan suatu pelanggaran hukum, dengan adanya kewenangan Notaris maka melekat tanggung jawab, sehingga dengan adanya tanggung jawab tersebut maka dengan sendirinya melekat pertanggungjawaban, apabila melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai peraturan perundang-undangan maka terhindar dari pertanggungjawaban, begitu pula sebaliknya, apabila melanggar tanggung jawab maka dapat dimintai pertanggungjawaban Kode etik, Administratif, Perdata bahkan Pidana tergantung tanggung jawab hukum yang dilanggar. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum tanggung jawab pidana notaris dalam kewenangan sebagai PPAT di POLDA Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut yaitu : a) Faktor Struktur Hukum adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saat ini belum secara tegas mengatur sanksi pidana bagi notaris, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. b) Faktor Substansi Hukum adalah Efektivitas hukum dalam dunia kenotariatan dipengaruhi oleh profesionalisme dan moralitas aparat penegak hukum. c) Faktor Sarana dan Fasilitas adalah Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pendukung hukum yang memadai, menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan pada nilai-nilai Agama, Pancasila, Undang-Undang RI Tahun 1945, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode etik Notaris serta peraturan perundang-undangannya lainnya dan wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian, *Check and Recheck* dan memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta autentik, dan apabila klien tetap pada pendirian maka Notaris wajib menolak untuk membuat akta autentik, sehingga menjadi pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap permasalahan profesi Notaris dari pertanggungjawaban Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, , UII Press, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada media Group, 2009.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Heriyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris: Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana*, Jakarta, Yuma Pustaka, 2016.
- M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Muh. Ikhsan Kurniawan, *Skripsi Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (Akta Jual Beli) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar, 2022.
- H. S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, cetakan Kesatu*, Jakarta, Rajawali Press, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Tim Nusantara, cet. I, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), Pasal 1457.
- Undang-Undang Jabatan Notaris

Wawancara

- Suryadi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum.